



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AAN EKO WIDIARTO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 675430

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.600.000.000

1. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/90 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 251.500.000

1. MOTOR, HONDA N012AICE A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 713.450.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 160.153.263**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 5.725.103.263**III. HUTANG** Rp. 529.030.396**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.196.072.867



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.